

Implementation of the Next Generation Social Welfare Information System (SIKS-NG) in Tinggarbuntut Village, Bangsal District

[Implementasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di Desa Tinggarbuntut Kecamatan Bangsal]

Muhammad Diaz Handa Pratama¹⁾, Isnaini Rodiyah^{*,2)}

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: isnainirodiyah@umsida.ac.id

Abstract. *This research aims to determine the implementation of the Next Generation Social Welfare Information System (SIKS-NG) in Tinggar Buntut Village, Bangsal District. This research uses qualitative descriptive. Data collection techniques are interviews, observation and documentation. The data analysis technique used by the Miles and Huberman model is through data collection, data reduction, and data presentation and drawing conclusions. The research results were reviewed from four indicators. First, Communication Indicators have not been implemented due to lack of socialization. Second, resources are not yet in line with information technology needs in implementing SIKS-NG. Third, the disposition has been said to be good because the commitment to implement SIKS-NG in Tinggar Buntut Village is already owned by the Tinggar Buntut Village Government. Fourth, the bureaucratic structure is good but there is still no written SOP regarding SIKS-NG in Tinggar Buntut Village.*

Keywords - Imple Implementation, SIKS-NG, Proverty Data

Abstrak. *Implementasi Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di Desa Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal. Dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan model Miles dan Huberman melalui pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ditinjau dari empat indikator. Pertama, Indikator Komunikasi belum terlaksana dikarenakan kurangnya sosialisasi. Kedua, sumberdaya belum sesuai dengan kebutuhan teknologi informasi dalam implementasi SIKS-NG. Ketiga, Disposisi sudah dikatakan baik dikarenakan komitmen untuk mengimplementasikan SIKS-NG di Desa Tinggar Buntut sudah dimiliki oleh Pemerintah Desa Tinggar Buntut. Keempat, Struktur Birokrasi sudah baik namun masih belum memiliki SOP secara tertulis mengenai SIKS-NG di Desa Tinggar Buntut.*

Kata Kunci - Implementasi, SIKS-NG, Data Kemiskinan

I. PENDAHULUAN

Good governance adalah tata kelola yang baik pada sebuah negara berdasarkan pada sikap profesional dalam proses berusaha dan berkarya. *Good governance* tak jarang diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik. *Good governance* juga didefinisikan sebagai sebuah pelaksanaan manajemen dalam pembangunan yang kokoh dan memiliki tanggung jawab yang selaras dengan konsep demokrasi yang efisien. Sebuah negara dapat dikatakan telah menerapkan *good governance* dengan baik apabila pada negara tersebut terdapat beberapa ciri dari *good governance* yakni penegakan supremasi hukum, prioritas sosial politik dan ekonomi dilandaskan pada consensus komunitas, seluruh pihak dilibatkan untuk bertanggung jawab secara transparan serta adil dan efektif, serta kepentingan dari kelompok tertinggal dan miskin selalu menjadi pertimbangan dalam proses pengambilan dan perumusan kebijakan [1]. Di Indonesia sendiri, *good governance* bukan merupakan sebuah istilah yang baru. Konsep ini pertama kali muncul di Indonesia setelah era reformasi yang disebabkan oleh masalah-masalah yang ditinggalkan oleh pemerintah orde baru. *Good governance* sudah lama menjadi mimpi yang terus diusahakan pencapaiannya oleh bangsa Indonesia. Sebab dengan *good governance* diharapkan dapat membantu proses integrasi antara peran pemerintah, sektor pemerintah dan masyarakat sehingga pemerintahan di Indonesia akan lebih efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan [2]. Meskipun bukan merupakan istilah baru, namun penerapan *good governance* di Indonesia masih menemui beberapa kendala atau permasalahan. Permasalahan tersebut adalah adanya ketidakadilan dan kurangnya efisiensi pada pelayanan publik, presentase korupsi, kolusi dan nepotisme masih cukup tinggi, banyak ditemukan penyalahgunaan dan pelanggaran wewenang oleh pejabat publik dan lain sebagainya [3]. Oleh karena itu, dalam upaya mewujudkan

tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan kerjasama, komitmen dan tanggung jawab serta kesadaran dari seluruh stakeholder yang terlibat baik dari golongan pemerintah ataupun masyarakat.

Beberapa permasalahan implementasi good governance diatas memberikan dampak buruk bagi dunia pelayanan publik di Indonesia sehingga citra buruk pada pelayanan publik sudah sangat melekat di kalangan masyarakat. Hal tersebut menjadi dasar dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau yang biasa disebut dengan SPBE adalah pelaksanaan pemerintahan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan pelayanan kepada para pengguna SPBE [4]. Dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 disebutkan bahwa beberapa prinsip pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yakni efektivitas, efisiensi, keamanan, keterpaduan, kesinambungan dan akuntabilitas. Oleh karena itu, melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini besar harapan negara Indonesia untuk menghasilkan pelayanan yang transparan, mudah diakses oleh masyarakat dan efektif tanpa berbelit-belit. Praktek implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tidak dapat dipisahkan dari E-Government. E-Government didefinisikan sebagai tata cara interaksi terbaru antara pemerintah dengan masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih berkualitas [5]. Sejak disuarakannya implementasi E-Government di Indonesia, pemerintah Indonesia berlomba- lomba untuk melakukan transformasi pelayanan yang semula bersifat manual menjadi online dengan mengeluarkan sejumlah inovasi baru berupa sistem informasi dan sejumlah aplikasi [6]. Terobosan tersebut tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik di Indonesia saja, namun dengan hadirnya terobosan tersebut diharapkan dapat mengatasi beberapa masalah yang ada di negara Indonesia ini, salah satunya ialah permasalahan kemiskinan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemiskinan merupakan masalah yang tak kunjung usai. Terlebih sejak kehadiran wabah covid-19 di Indonesia, terjadi PHK secara besar-besaran sehingga jumlah pengangguran mengalami lonjakan yang cukup tinggi. Dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin maka berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ini, salah satunya dengan pemberian bantuan sosial (bansos) [7]. Namun pada kenyataannya, pemerintah Indonesia belum mampu menurunkan presentase kemiskinan di Indonesia karena sering terjadi salah sasaran karena banyak data penerima program yang tidak valid. Sebagai bentuk peningkatan ketepatan sasaran bansos di Indonesia, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang mekanisme penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT PPFM) [8] dan Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Verifikasi dan Validasi DT PPFM [9]. Dalam Permensos tersebut memutuskan bahwa verifikasi dan validasi DT PPFM dilakukan oleh pemerintah Kabupaten atau Kota dan pemerintah desa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan data. Untuk meminimalisir terjadinya kesalahan data tersebut, pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial membuat inovasi baru bernama Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS- NG).

Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) merupakan aplikasi untuk menginput dan memperbarui data kemiskinan di setiap desa dan kelurahan dirancang sebagai alat yang efisien dan terpadu dalam manajemen informasi kemiskinan. Dengan fokus pada keakuratan dan ketepatan, aplikasi ini bertujuan untuk menyediakan sarana yang efektif bagi pihak terkait dalam mengumpulkan dan memperbarui data kemiskinan di tingkat lokal, sehingga dapat mendukung perencanaan dan implementasi program bantuan yang lebih tepat sasaran, menjangkau individu dan keluarga yang paling membutuhkan. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation atau yang kemudian disingkat menjadi SIKS-NG adalah aplikasi manajemen yang dimiliki oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan kegunaan untuk melakukan proses pengusulan data baru dan perbaikan data terpadu sejumlah masyarakat miskin yang ada di sebuah desa. Kemensos RI memberikan bimbingan teknis kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur mengenai penggunaan aplikasi SIKS-NG. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur kemudian mensosialisasikan dan memberikan pelatihan bimbingan teknis kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Dinas Sosial Kabupaten/Kota selanjutnya berkoordinasi dengan Kecamatan dan Kelurahan/Desa untuk melakukan pendataan dan verifikasi data penerima manfaat menggunakan aplikasi SIKS-NG. Data yang terkumpul kemudian dilaporkan secara online dan real-time ke Kemensos RI melalui SIKS-NG. Sistem ini dikeluarkan pada tahun 2020 dengan berlandaskan pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 mengatur tentang Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS). Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk mengintegrasikan data yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial untuk menyediakan informasi penyaluran bantuan sosial serta mendukung perencanaan program-program kesejahteraan sosial yang lebih efektif dan efisien. Dalam sistem ini, ditemukan sejumlah fitur lainnya seperti perbaikan data dan pengusulan data penerima Bantuan Sosial yang baru sehingga nantinya akan menghasilkan rekapitulasi dan data hasil dari perbaikan serta pengusulan data baru. Dalam pemanfaatannya, di setiap Kelurahan/Desa terdapat petugas operator. Tugas para operator di setiap Kelurahan/Desa adalah untuk melakukan proses perubahan data dan pengusulan data baru penerima bantuan sosial sehingga masyarakat yang akan mendaftarkan diri menjadi penerima baru maupun masyarakat yang hanya akan melakukan pengecekan data secara konstan dapat mendatangi kantor Desa atau Kelurahan tempat mereka tinggal dengan membawa dokumen pendukung seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Dengan sistem ini juga tersedia informasi terkait alasan mengapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah tidak menerima bantuan.

Beberapa fitur yang dimiliki oleh SIKS-NG membuat sistem ini memiliki peran yang cukup penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dengan adanya aplikasi SIKS-NG, desa dapat secara efektif mengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang merupakan basis data penting untuk penanganan kemiskinan dan kesejahteraan sosial. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data yang berisikan informasi terkait sebuah keluarga atau individu yang membutuhkan bantuan sosial dan pemberdayaan sosial dari pemerintah. Aplikasi ini memungkinkan pihak desa untuk mengumpulkan, memperbarui, dan mengelola informasi mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara terintegrasi dan real-time. Dengan data yang akurat dan terkini, desa dapat dengan mudah mengidentifikasi individu atau keluarga yang berhak menerima bantuan sosial, sehingga program-program yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dapat dilaksanakan dengan lebih tepat sasaran. Seperti yang kita ketahui, Kementerian Sosial memiliki sejumlah program yang bertujuan untuk meretas kemiskinan yang ada di Indonesia. Beberapa program tersebut antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Bantuan Iuran (PBI) dan lain sebagainya. Keberhasilan Kementerian Sosial dalam menanggapi kemiskinan tidak hanya bergantung pada beberapa program tersebut, namun juga didasarkan pada data yang akurat, yang mana data tersebut dapat dilihat melalui aplikasi SIKS-NG. Data yang akurat dan terkini mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dapat diakses dengan mudah, memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan dalam penanganan kemiskinan dan pemberian bantuan sosial. Aplikasi ini mengintegrasikan berbagai sumber informasi, sehingga memungkinkan pihak desa dan pemerintah untuk melihat secara jelas siapa saja yang membutuhkan bantuan, serta kondisi yang mereka hadapi. Dengan data yang terperinci dan dapat diperbarui, SIKS-NG tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan bantuan, tetapi juga memastikan bahwa program-program sosial yang dilaksanakan tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini pada gilirannya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan sosial, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Berikut adalah tampilan dari SIKS-NG.



Gambar 1. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG)

Sumber: siks.kemensos.go.id, 2024.

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan tampilan halaman login dari SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation GIS), sebuah platform digital yang dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sistem ini digunakan untuk mengelola dan memantau data kesejahteraan sosial, termasuk informasi terkait bantuan sosial, keluarga miskin, serta kelompok rentan lainnya. Salah satu desa yang menggunakan sistem tersebut ialah Desa Tinggarbuntut, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Desa Tinggarbuntut telah menggunakan SIKS-NG sejak tahun 2019 untuk menangani masalah kemiskinan di wilayah tersebut. Meskipun Desa Tinggarbuntut sudah sejak lama menggunakan sistem ini, bukan berarti dalam penerapannya tidak ditemui permasalahan atau kendala. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dampak dari tantangan ini, data mengenai data penerima bantuan di Desa Tinggarbuntut sebagai berikut:

Tabel 1. Data Usulan Penerima Bantuan

Jenis Bantuan Sosial	Jumlah Alokasi SIKS-NG	Jumlah Realisasi
PBI	737	701
Sembako	840	791
PKH	982	940

Sumber: Pemerintah Desa Tinggarbuntut, 2024 (diolah oleh peneliti)

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan adanya selisih antara alokasi dan realisasi bantuan di Desa Tinggarbuntut, yang mencerminkan tantangan dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Pada Program Bantuan Iuran (PBI), dari total alokasi 737 penerima, hanya 701 yang terealisasi, sehingga terdapat selisih 36 penerima yang seharusnya mendapatkan bantuan namun tidak menerima. Begitu pula pada Bantuan Sembako, dari 840 alokasi, hanya 791 yang terealisasi, menghasilkan selisih 49 penerima. Sementara itu, pada Program Keluarga Harapan (PKH), dari 982 alokasi, hanya 940 yang terealisasi, dengan selisih 42 penerima. Selisih ini menunjukkan adanya penerima bantuan yang terdaftar dalam sistem SIKS-NG tetapi tidak mendapatkan bantuan secara tepat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi dan perbaikan dalam proses pendataan dan distribusi bantuan agar semua penerima yang berhak dapat menerima bantuan yang telah dialokasikan, sehingga program pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat perbandingan antara jumlah penduduk yang miskin dengan jumlah KPM yang terdaftar sehingga diketahui bahwasanya belum sepenuhnya penduduk miskin di Desa Tinggarbuntut telah terdaftar dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tervalidasi dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Diketahui pada Tahun 2021 dalam total jumlah 737 Penduduk miskin yang ada di Desa Tinggarbuntut yang terdaftar dalam SIKS-NG hanya berjumlah 701. Selain itu juga pada Tahun terakhir yakni tahun 2023 dengan jumlah penduduk miskin 982 namun kenyataannya yang telah terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan tervalidasi dalam SIKS-NG hanya berjumlah 940 penduduk saja. Hal tersebut tentu menjadi kendala dalam penerapan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation di Desa Tinggarbuntut Kabupaten Mojokerto.

Pada proses penyusunan artikel ilmiah ini, penelitian terdahulu dengan fokus yang sama memiliki peran yang cukup penting yakni sebagai pedoman penulisan. Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah penelitian dengan judul “Penerapan Aplikasi Siks-Ng Dalam Penerimaan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Di Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan” berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa dalam penerapan aplikasi SIKS-NG di Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan ditemukan beberapa permasalahan sehingga perbaikan sangat diperlukan, salah satu saran yang dikemukakan penulis ialah diperlukan kordinasi yang baik oleh pihak pelaksana dan stake holder yang terlibat sehingga data yang dihasilkan cukup valid [10]. Penelitian selanjutnya ialah “Penerapan E-Government Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Untuk Pengajuan DTKS” hasil dari penelitian ini adalah aplikasi SIKS-NG ini memberikan sejumlah dampak positif pada masyarakat yang dijadikan sasaran seperti dapat meningkatkan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat [11]. Selanjutnya penelitian dengan judul “Penerapan E-Government Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Sebagai Aplikasi Pengolah Data Kemiskinan Di Kabupaten Bengkulu Selatan” dalam penelitian ini ditemukan hasil bahwa manfaat SIKS-NG sudah terasa yakni dapat memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi terkait bantuan sosial, meskipun demikian kekurangan dari penerapan SIKS-NG ini juga ditemukan kendala tertentu khususnya sumber daya finansial yang belum mencukupi serta kurangnya tenaga ahli pada bidang informasi teknologi [12]. Kemudian penelitian dengan judul “Penerapan E-Government Pada Aplikasi SIKS-NG di Desa Sihiong Kecamatan Bonatua Lunasi Kabupaten Toba” hasil dari penelitian ini ialah implementasi dari aplikasi menghasilkan data yang selaras dengan keadaan di lapangan [13]. Berlandaskan pada referensi penelitian terdahulu yang telah disebutkan diatas, perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah penulis akan berfokus pada Implementasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di Desa Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal yang merupakan satu dari banyak desa yang menggunakan SIKS-NG sebagai sistem informasi untuk pendataan bagi warga masyarakat mereka. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori implementasi menurut George Edward III. Implementasi ialah pelaksanaan atau penerapan sebuah rencana yang telah tersusun secara spesifik dan dalam penerapan sebuah rencana tersebut bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Pada teori implementasi oleh George Edward iii ini terdapat empat indikator yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Jika dikaitkan dengan permasalahan yang telah ditemukan penulis maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di Desa Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal.

Dalam pelaksanaan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di Desa Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal, ditemukan beberapa kendala yang menghambat implementasinya, diantaranya: Pertama, kurangnya fasilitas yang memadai. SIKS-NG merupakan aplikasi yang cukup berat, sehingga memerlukan perangkat komputer atau laptop yang memiliki spesifikasi yang baik untuk dapat beroperasi dengan lancar. Namun pada

kenyataannya, perangkat yang tersedia di Desa Tinggarbuntut sering kali tidak memenuhi syarat untuk menjalankan SIKS-NG secara optimal dan maksimal. Kedua, kinerja operator yang mengelola sistem SIKS-NG juga menjadi perhatian. Banyak operator yang belum memiliki kecepatan dan ketepatan dalam mengoperasikan sistem, yang disebabkan oleh kurangnya pelatihan dan latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan tugas yang dikerjakan. Hal ini mengakibatkan proses pengolahan data menjadi lambat dan tidak efisien. Dan yang ketiga, belum semua penduduk miskin yang terdata telah diinput ke dalam SIKS-NG. Terdapat juga kesalahan dalam penginputan data, seperti nama dan asal Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang sering kali disebabkan oleh kurangnya komunikasi yang jelas antara operator dan calon KPM. Komunikasi yang tidak efektif ini dapat mengakibatkan kesalahan informasi yang berpotensi merugikan masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai “Implementasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di Desa Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal”

II. METODE

Penelitian dengan judul “Implementasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di Desa Tinggar Buntut Kecamatan Mojokerto” ini termasuk pada penelitian deskriptif dengan menggunakan jenis data kualitatif. Metode penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai sebuah metode penelitian yang menggunakan data berjenis deskriptif yang berupa tulisan atau lisan yang berasal dari orang dan pelaku yang dapat diwawancarai atau diamati [14]. Selain itu, penelitian lain menyebutkan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menyelidiki, menggambarkan dan menemukan sebuah objek yang sedang diteliti dan digunakan untuk menjabarkan atau menjelaskan keistimewaan dari pengaruh dunia sosial yang kemudian dijabarkan dan dilakukan pengukuran dengan menggunakan metode kuantitatif [14]. Dengan metode penelitian berjenis kualitatif deskriptif ini peneliti memiliki maksud untuk mengetahui dan menjelaskan secara spesifik dan terperinci tentang implementasi sistem informasi kesejahteraan sosial next generation (SIKS-NG) di Desa Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal. Adapun Lokasi dari penelitian ini ialah pada Desa Tunggal Buntut Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. Definisi dari teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti, dalam teknik pengumpulan data ini diperlukan Langkah yang strategis dan efisien agar data yang valid dan selaras dengan kenyataan dapat dengan mudah didapatkan [15]. Teknik pengumpulan data ini dilaksanakan untuk menghimpun data yang dapat mendukung penelitian yang sedang dilakukan penulis. Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dari data primer yang bersumber dari kegiatan wawancara yang dilakukan oleh penulis secara langsung dengan informan yakni Suji Handoko selaku Kepala Desa Tunggal Buntut Kecamatan Bangsal dan Nurul Yakin selaku Operator Aplikasi SIKS-NG Desa Tunggal Buntut Kecamatan Bangsal. Untuk menyempurnakan hasil dari penelitian ini, penulis juga menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari beberapa dokumen yang tersedia di lapangan, beberapa jurnal atau karya ilmiah dan juga berasal dari beberapa arsip yang diperoleh dari internet. Fokus dalam penelitian ini ialah berhubungan dengan Implementasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di Desa Tinggar Buntut Kecamatan Mojokerto, sedangkan fokus indikator pada penelitian ini ialah indikator yang digunakan untuk mengkaji terkait implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III yang didalamnya berisikan beberapa indikator, yakni indikator komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Selanjutnya teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian berjudul Implementasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di Desa Tinggar Buntut Kecamatan Mojokerto ialah dengan memilih informan dengan berdasarkan pada penentuan atas karakteristik dari sampel yang dipakai dan dinilai selaras dengan tujuan dari penelitian ini atau yang biasa disebut dengan teknik purposive sampling [16]. Dan untuk analisis data dari hasil penelitian ini mengikuti kaidah model analisis data oleh Miles dan Huberman. Teknik analisis data merupakan sebuah proses analisis, organisasi data no humeric untuk dijadikan informasi yang nantinya dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan pengembangan terhadap hasil penelitian. Dalam proses analisis data terdapat beberapa langkah, langkah tersebut ialah reduksi data, yakni kegiatan melakukan pemilahan, memfokuskan, dan mengubah data yang diperoleh dari penelitian di lapangan, selanjutnya ialah penyajian data yang didefinisikan sebagai proses pengumpulan informasi yang terkumpul dan memiliki peluang terjadinya penarikan kesimpulan, dan yang terakhir ialah penarikan Kesimpulan yang memiliki arti sebagai penyimpulan data yang sejalan dengan rumusan masalah yang sudah ditentukan diawal proses penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan perolehan data dan informasi dari hasil observasi, wawancara peneliti memperoleh hasil pembahasan penelitian Implementasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di Desa Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal sebagai berikut:

Komunikasi

Komunikasi adalah proses pertukaran informasi. Dalam proses ini, seseorang (komunikator) mengirimkan pesan kepada orang lain (komunikan) dengan tujuan untuk menyampaikan suatu ide, gagasan, atau data. Komunikasi terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Informasi kebijakan publik harus disampaikan secara jelas kepada para pelaksana kebijakan. Hal ini bertujuan agar mereka memiliki pemahaman yang komprehensif tentang apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan kebijakan. Dengan demikian, implementasi kebijakan dapat berjalan efektif dan sesuai dengan yang diharapkan [17]. Pada komunikasi internal staf Desa Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal. Dalam implementasinya, ada pembagian tugas secara khusus. Namun terdapat satu administrator pengelola aplikasi SIKS- NG. dimana staff tersebut memiliki tugas yaitu memberikan update data melalui aplikasi SIKS-NG sehingga data yang masuk pada aplikasi tersebut sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Suji Handoko selaku Kepala Desa Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal sebagai berikut:

“memang untuk tenaga teknis yang mengelola aplikasi SIKS-NG ini sudah ada pembagiannya. Kami di sini sepakat untuk menunjuk satu staff guna pengelolaannya yang tujuannya agar dapat fokus mengupdate data pada aplikasi SIKS-NG tersebut. Solanya inikan berhubungan dengan bantuan yang memang harus diberikan kepada warga yang memang kondisi ekonominya kurang di desa sini. Jadi kami tidak mau mengambil resiko jika bantuan tersebut tidak diberikan sesuai dengan peruntukannya.” (Wawancara, 03 Desember 2024)

Pernyataan diatas juga diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Nurul Yakin selaku Operator Aplikasi SIKS-NG di Desa Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal sebagai berikut:

“memang saya mendapat tugas dari Pak Kades untuk menjadi operator SIKS-NG. Mulai dari sosialisasi, update data, sampai nanti proses pengajuan, serta pelaporan saya yang menanganinya. Sebenarnya pekerjaannya bukan hanya SIKS- NG aja, banyak juga lainnya. Namun, SIKS-NG ini yang diprioritaskan. Jadi apapun yang berkaitan dengan SIKS- NG saya yang melaksanakan.” (Wawancara, 03 Desember 2024)

Sedangkan pada komunikasi eksternal, yaitu admin dengan masyarakat. Desa Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal memberikan sosialisasi kepada seluruh ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal dengan memberikan selebaran surat undangan untuk datang ke Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal. Sosialisasi program merupakan titik awal yang menentukan keberhasilan program dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu sosialisasi program harus dilakukan dengan cara-cara yang terencana dan sistematis dengan memberdayakan sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi agar tujuan yang direncanakan tercapai dengan baik. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Suji Handoko selaku Kepala Desa Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal sebagai berikut:

“pada awal adanya aplikasi SIKS-NG ini ada, kami melakukan sosialisasi dan mengundang seluruh RT, RW, Kasun se Desa Tinggar Buntut. Tujuannya agar pemerintah desa yang paling terkecil dan paling dekat dengan masyarakat ini mengetahui bahwa saat ini telah ada aplikasi yang digunakan untuk pengajuan bantuan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu. Kami juga memberikan informasi bahwa aplikasi ini bertujuan agar bantuan langsung bisa diambil melalui ATM penerima manfaat dan tidak melalui desa.” (Wawancara, 03 Desember 2024)

Berdasarkan wawancara diatas diketahui bahwa pemerintah Desa Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal telah melakukan sosialisasi dengan RT, RW, dan Kasun dilingkungan Desa dengan tujuan untuk memberikan informasi mengenai aplikasi SIKS-NG untuk program bantuan sosial yang diberikan langsung oleh pemerintah pusat. Berikut merupakan dokumentasi kegiatan sosialisasi SIKS-NG di Desa Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal sebagai berikut:



Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi SIKS-NG di Desa Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2024

Berdasarkan gambar 2, diketahui bahwa sosialisasi SIKS-NG telah dilakukan di Desa Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal. Namun sosialisasi tersebut hanya dilakukan sekali saja sebagaimana disampaikan oleh Bapak Suji Handoko selaku Kepala Desa Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal sebagai berikut:

“Di Desa Tinggar Buntut ini dilakukan sosialisasinya hanya satu kali saja. Sosialisasi dilakukan paada awal aplikasi SIKS-NG ini ada. Selanjutnya berjalan sesuai dengan mekanisme, jika ada perubahan atau pembaharuan mengenai SIKS-NG juga kami tidak melakukan sosialisasi lagi.” (Wawancara, 03 Desember 2024)

Kegiatan sosialisasi dilakukan hanya satu kali dan jika ada pembaharuan aplikasi SIKS-NG pemerintah Desa Tinggar Buntut tidak melakukan sosialisasi ulang. Kondisi tersebut membuat perangkat desa yang terkecil yaitu RT, RW, dan Kasun tidak dapat mengetahui dengan jelas mengenai perubahan atau pembaharuan yang ada pada aplikasi SIKS-NG tersebut sehingga terdapat beberapa ketidak sesuaian informasi yang didapat oleh pihak RT, RW, dan Kasun. Sebagaimana disampaikan oleh Suji Handoko selaku Kepala Desa Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal sebagai berikut:

“memang saya juga memahami sosialisasi yang kami lakukan kurang, dikarenakan jika ada pembaharuan dari SIKS- NG ini kami tidak sosialisasikan lagi. Tersu juga mengenai hasil validasi yang tidak sesuai dengan pengajuan kami juga kami tidak sampaikan kepada pengusung. Jadi kadang juga ada misskomunikasi. Tapi, memang kami juga terkendala waktu dan biaya juga. Validasi melalui SIKS-NG juga membutuhkan waktu maksimal tiga bulan dari pengajuan ke pusat. .” (Wawancara, 03 Desember 2024)

Berdasarkan wawancara dan data diatas dapat diketahui terkait indikator komunikasi Desa Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal belum baik dikarenakan Pemerintah Desa Tinggar Buntut hanya melakukan sosialisasi kepada stake holder terkait SIKS-NG hanya dilakukan sekali, sehingga saat ada pembaharuan di SIKS-NG tidak dilakukan sosialisasi Kembali. Kondisi tersebut sering kali menimbulkan perselisihan antara pengusung dan pihak pemerintah Desa Tinggar Buntut. Hasil yang dijumpai penulis sama dengan penelitian terdahulu berjudul “Penerapan Aplikasi SIKS-NG Dalam Penerimaan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Di Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan” dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa di Kelurahan Majasari masih belum memiliki data yang valid dikarenakan kurangnya kordinasi yang baik oleh pihak pelaksana dan stake holder yang terlibat.

Sumber Daya

Ketersediaan dan kualitas sumber daya menjadi penentu keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Sumber daya yang memadai, baik berupa sumber daya manusia maupun fasilitas, sangat krusial dalam menunjang kelancaran proses pelaksanaan kebijakan. Kekurangan atau ketidaksesuaian sumber daya dapat menghambat pencapaian tujuan

kebijakan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, upaya untuk memastikan ketersediaan sumber daya yang optimal perlu dilakukan agar implementasi kebijakan dapat berjalan efektif dan efisien [18].

Edward III (1980) menegaskan bahwa ketersediaan sumber daya yang memadai, seperti keuangan, manusia, dan peralatan, merupakan faktor kunci keberhasilan implementasi kebijakan. Tanpa dukungan sumber daya yang cukup, pelaksanaan kebijakan akan terhambat dan sulit mencapai tujuannya. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang terlibat. Kekurangan atau ketidaksesuaian kompetensi sumber daya manusia dapat menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan kebijakan. Sebaliknya, sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki kapasitas yang memadai akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia merupakan faktor kunci yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu program. Jika kita tinjau kondisi di lapangan, seperti di Desa Tinggar Buntut, sumber daya manusia tidak menjadi kendala yang nyata. Jumlah perangkat desa yang sudah sesuai dengan beban kerja. Berikut merupakan data jumlah pegawai pemerintahan Desa Tinggar Buntut sebagai berikut:

Tabel 2. Data Jumlah Pegawai Pemerintah Desa Tinggar Buntut

Jabatan	Jenis Kelamin	Jumlah
Kepala Desa	L	1
Sekretaris Desa	L	1
Kaur Tata Usaha dan Umum	L	1
Kaur Keuangan	L	1
Kasi Pemerintahan	L	1
Kasi Kesejahteraan	L	1
Kasi Pelayanan	P	1
Staff Perangkat Desa	L	1
Total		8

Sumber : Diolah Penulis (2024)

Berdasar tabel 2, dapat diketahui bahwa jumlah perangkat Desa Tinggar Buntut jumlahnya delapan orang dan satu orang merupakan staff. Sebagaimana yang disampaikan saat penulis melakukan penelitian, staff tersebut merupakan perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa guna mengoperasikan Aplikasi SIKS-NG. Untuk meoperasikan aplikasi SIKS-NG diperlukan sumber daya manusia yang mumpuni. di Pemerintahan Desa Tinggar Buntut belum didukung oleh operator yang memiliki kemampuan pengelolaan teknologi informasi. Sebagaimana disampaikan oleh Suji Handoko selaku Kepala Desa Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal sebagai berikut:

“dalam pengoperasian aplikasi SIKS-NG ini memang saya menunjuk perangkat Desa yang memiliki kemampuan dibidang IT yang lebih dibandingkan lainnya, tujuannya agar Desa kami tidak tertinggal atau tidak memahami bagaimana aplikasi SIKS-NG ini. kalau dibandingkan dengan yang lain mungkin kemampuannya masih dibawahnya dikarenakan memang latar belakang pendidikannya juga hanya SMA. Tapi kalau dilingkungan pemdes sini cukup lah. Terlepas juga kita dijembatani dengan pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh dinsos atau pemerintah daerah juga dengan bimtek-bimteknya. Kalau saya tidak menunjuk perangkat desa yang mahir IT juga tidak ada fungsinya. Memang untuk Pendidikan formal staff yang saya pilih ini masih SMA saja, memang masih membutuhkan untuk emingkatkan Pendidikan formalnya saya rasa begitu.” (Wawancara, 03 Desember 2024)

Berdasarkan pernyataan diatas diketahui bahwa di Desa Tinggar Buntut memiliki operator aplikasi SIKS-NG yang memiliki kemampuan bidan teknologi infomasi yang belum cukup mumpuni dan masih memiliki latar belakang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) jika dibandingkan dengan staff yang ada di Pemerintah Desa lainnya. Selain sumber daya manusia yang mumpuni juga perlu didukung dengan ketersediaan fasilitas yang memadai dan berkualitas merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan suatu organisasi. Fasilitas yang baik tidak hanya mendukung tercapainya tujuan organisasi, tetapi juga berperan penting dalam memfasilitasi koordinasi dan

pengelolaan kegiatan sehari-hari. Infrastruktur yang memadai akan menjadi fondasi yang kuat bagi organisasi dalam menjalankan operasionalnya secara efektif dan efisien. Sebagaimana disampaikan oleh Suji Handoko selaku Kepala Desa Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal sebagai berikut:

“saya rasa tidak hanya sumber daya manusia saja yang harus terpenuhi kemampuannya, kami juga berusaha memberikan fasilitas yang menunjang untuk mengimplementasikan Aplikasi SIKS-NG ini dengan baik sesuai dengan peruntukannya. Memang saya akui untuk fasilitas seperti computer atau laptop sejak awal sudah kami sediakan, namun awal adanya aplikasi ini kekurangan dikami yaitu jaringan internet yang kurang baik. Bisa dikatakan lemotlah, kemudian kami tahu bahwa kebutuhan internet saat ini memang sangat dibutuhkan sehingga hal tersebut segera diperbaiki. Hingga saat ini alhamdulillah jaringan internet di wilayah kantor desa ini sudah baik dan dapat mendukung kinerja kita.” (Wawancara, 03 Desember 2024))

Pernyataan diatas juga diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Nurul Yakin Selaku Operator Aplikasi SIKS-NG di Desa Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal sebagai berikut:

“awal-awal dulu jaringan internet memang menjadi hambatan kita untuk mengakses atau melakukan kegiatan yang bersifat online. Untungnya pak kepala desa mau menerima masukan kami sehingga dilakukan perbaikan jaringan internet yang memadai guna menunjang kinerja kita. Hingga saat ini fasilitas yang diberikan saya rasa sudah cukup menunjang baik dalam pengoperasian aplikasi SIKS-NG ini.” (Wawancara, 03 Desember 2024)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal telah memiliki sarana dan prasarana yang sudah mendukung kebutuhan pengoperasian aplikasi SIKS-NG Desa Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal. berikut merupakan data sarana dan prasarana Desa Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal yang mendukung dalam pengoperasian aplikasi SIKS-NG sebagai berikut :

Tabel 3. Data Jumlah Sarana dan Prasarana Desa Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal

No	Jenis Fasilitas	Jumlah	Kondisi
1	Komputer	2	Baik
2	Laptop	4	Baik
3	Printer	2	Baik
4	HP	2	Baik
5	LCD	1	Baik

Sumber : Diolah Penulis, (2024)

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana yang diberikan oleh Desa Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal sudah dapat dikatakan baik dan dapat menunjang pengoperasian aplikasi SIKS-NG. Sumber daya lainnya yaitu berupa anggaran, dimana di Desa Tinggar Buntut tidak memiliki alokasi dana khusus untuk implementasi SIKS-NG sebagaimana disampaikan oleh Bapak Suji Handoko selaku Kepala Desa Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal sebagai berikut:

“untuk alokasi dana khusus untuk Implementasi SIKS-NG ini memang di Desa Tinggar Buntut tidak ada. Jadi ya kita penuhi aja kebutuhan sarana dan prasarana sesuai dengan kemampuan. Jadi memang ga ada yang dikhususkan.” (Wawancara, 03 Desember 2024)

Hasil penelitian berdasarkan wawancara terkait indikator sumber daya sudah dapat dikatakan belum terpenuhi. Dimana pada sumber daya manusia belum dapat mengoperasikan aplikasi SIKS-NG sesuai dengan kebutuhan dikarnakan kemampuan teknologi informasi yang kurang mempuni. Sedangkan pada sumber daya sarana dan prasarana juga sudah dapat terpenuhi dimana sarana dan prasarana yang menunjang pada pengoperasian aplikasi SIKS-NG tersebut telah disediakan oleh Pemerintah Desa Tinggar Buntut. Serta dalam sumber daya anggaran

Pemerintah Desa Tinggar Buntut tidak memiliki alokasi dana khusus untuk implementasi SIKS-NG. Hasil yang didapatkan oleh penulis saat ini sama dengan penelitian dengan judul “Penerapan E-Government Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Untuk Pengajuan DTKS” dimana pada penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu sama-sama telah memberikan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan kebutuhan pengoperasian aplikasi SIKS-NG.

Disposisi

Menurut Edward III, disposisi dalam konteks implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai komitmen atau kemauan kuat dari para pelaksana untuk benar-benar mewujudkan tujuan suatu kebijakan. Dengan kata lain, disposisi mencerminkan sejauh mana para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan memiliki keinginan yang tulus untuk mencapai hasil yang diharapkan. Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Pemilihan dan penempatan pegawai dalam suatu jabatan sangat krusial dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Sikap dan komitmen para pelaksana kebijakan akan sangat mempengaruhi keberhasilan suatu program. Jika para pegawai tidak memiliki motivasi dan dedikasi yang tinggi untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan, maka akan muncul berbagai kendala dalam proses implementasinya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memilih pegawai yang tidak hanya memiliki kompetensi yang sesuai, tetapi juga memiliki dedikasi yang tinggi terhadap kepentingan masyarakat. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Suji Handoko selaku Kepala Desa Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal sebagai berikut:

“dalam pengangkatan perangkat desa ini memang berada di ranah saya. Dalam pengangkatan perangkat desa baru saya dan perangkat desa serta BPD sepakat untuk memberikan kebijakan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelamar. Namun, dalam kesepakatan itu tidak terlepas dari dasar hukum yang kami acu yaitu UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 2. Salah satu isinya yaitu Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.” (Wawancara, 03 Desember 2024)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa dalam rekrutmen perangkat desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tinggar Buntut dilaksanakan berdasar UU Desa Nomor 6 Tahun 2014. Sehingga, Proses pengangkatan pegawai dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk mendapatkan calon pegawai yang tidak hanya memiliki kompetensi yang dibutuhkan, tetapi juga memiliki potensi untuk berkontribusi dalam pengembangan organisasi. Selain rekrutmen perangkat desa, Insentif merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program. Insentif dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat memotivasi seseorang atau kelompok untuk melakukan suatu tindakan. Dalam konteks implementasi program, insentif dapat berupa materi (uang, bonus, promosi) maupun non-materi (pengakuan, penghargaan, peluang pengembangan diri). Sebagaimana disampaikan oleh Suji Handoko selaku Kepala Desa Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal sebagai berikut:

“untuk insentif yang kami berikan kepada staff yang mengoperasikan SIKS-NG ini memang bukan dalam bentuk materi atau uang jasa. Dikarenakan memang setiap bulannya staff tersebut mendapatkan honor sesuai dengan ketentuan di desa kami. Untuk insentif yang kami berikan berupa pengembangan seperti mengikuti staff tersebut dalam kegiatan-kegiatan diklat yang dilakukan program SIKS-NG. kami juga ada niatan untuk memberikan bantuan untuk melanjutkan Pendidikan setingkat S1. Sehingga kami harap kemampuan tentang Tlanya makin berkembang.” (Wawancara, 03 Desember 2024)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa insentif yang diberikan oleh pemerintah Desa Tinggar Buntut yaitu mengikuti Operator SIKS-NG dalam segala kegiatan diklat yang berkaitan dengan SIKS-NG serta pemerintah Desa Tinggar Buntut kedepannya hendak memberikan beasiswa pengembangan kompetensi Operator SIKS-NG. Dapat diketahui bahwa latar belakang Pendidikan formal yang dimiliki oleh operator SIKS-NG tersebut yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA). Namun, kendati demikian operator SIKS-NG tersebut telah mampu dan

mengetahui tugas dan fungsinya dalam pengoperasian SIKS-NG sebagaimana disampaikan oleh Bapak Suji Handoko selaku Kepala Desa Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal sebagai berikut:

“meskipun dia lulusan SMA tetapi dia sangat memahami apa tugas dan fungsinya sebagai operator SIKS-NG. dari mulai update data, cek semua validasi yang dari pusat, pengajuan nama penerima manfaat, hingga mengajukan pemberhentian bantuan dikarenakan suatu dan lain hal. Semua bisa di lakukan oleh operator SIKS-NG tersebut dengan baik sepengetahuan saya.” (Wawancara, 03 Desember 2024)

Berdasarkan wawancara dapat dijumpai hasil pada indikator disposisi pada penelitian telah sesuai dengan indikator disposisi sebagaimana disampaikan oleh Edward III. Dimana dalam melakukan rekrutmen perangkat Desa Tinggar Buntut dilaksanakan berdasar UU Desa Nomor 6 Tahun 2014. Sehingga, Proses pengangkatan pegawai dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Sedangkan dalam insentif yang diberikan oleh pemerintah Desa Tinggar Buntut yaitu mengikuti Operator SIKS-NG dalam segala kegiatan diklat yang berkaitan dengan SIKS-NG serta pemerintah Desa Tinggar Buntut kedepannya hendak memberikan beasiswa pengembangan kompetensi Operator SIKS-NG. Serta operator SIKS-NG ini telah mengetahui tugas dan fungsinya sebagai operator SIKS-NG.

Struktur Birokrasi

Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi [19]. Dua karakteristik menurut Edward III yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi kearah yang lebih baik adalah melakukan *standar operating procedures* dan struktur birokrasi dalam implementasi SIKS-NG. Kerberradaan SOP diharapkan agar para pelaksana kebijakan dapat memanfaatkan waktu yang tersedia, menyerragamkan tindakan dari para pejabat dalam organisasi yang kompleks dan terserbar lurus sehingga akan mernimburkan fleksibilitas yang besar serta agar terjadinya surat kesamaan dalam perraturan-perraturan. Pernyerbaran tanggung jawab pada satu lingkup kebijakan diantara beberapa unit organisasi diserburt derngan fragmentasi. Dimensi fragmentasi mernurrut Widodo (2013) mernergaskan bahwa strukturr birokrasi yang terfragmentasi dapat meningkatkan gagalnya komunikasi karena akan membatasi kemampuan para pejabat tinggi untuk mengkoordinasikan semua sumber daya yang relevan dan akibat lebih lanjut dapat mernimburkan terjadinya ketidakfisiern serta pemborosan sumber daya yang langka.

Standard Operational Procedure (SOP) merupakan perkembangan dari turnturan internal akan kerpastian waktu, sumber daya serta kerbutuhan penyerragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan lurus agar prosers birokrasi dapat berjalan derngan efektif dan efisien. Di Pemerintahan Desa Tinggar Buntut belum memiliki SOP terkait SIKS-NG sebagaimana disampaikan oleh Bapak Suji Handoko selaku Kepala Desa Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal sebagai berikut:

“untuk SOP sendiri kami memang belum ada, untuk Langkah-langkah yang dilakukan itu memang disesuaikan dengan hasil mengikuti bimtek. Kemudian sama operator yang mengikuti itu di infokan kepada kami sehingga semuanya sudah tahu bagaimana langkah pengajuan bantuan melalui SIKS-NG. Kemudian persyaratan juga diinfokan saja secara lisan. Kami memang belum membuat secara tertulis SOPnya, Insyaallah kedepannya kami akan membuat SOP secara tertulis agar warga juga dapat mengetahui dan memahami bagaimana langkah atau prosedur dalam pengusulan bantuan melalui SIKS-NG itu sendiri. Memang keberadaan SOP dapat membuat kami yang terlibat pada implementasi SIKS-NG ini menjadi lebih konsisten dan akuntabilitas kami lebih baik lagi.” (Wawancara, 03 Desember 2024)

Pernyataan diatas juga diperkuat dnegan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Nurul Yakin selaku Operator Aplikasi SIKS-NG di Desa Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal sebagai berikut:

“memang untuk SOP secara tertulis di Desa ini belum ada, kami memberikan langkah-langkah itu secara oral jadi dari mulut ke mulut. Memang itu kurang efektif dikarenakan masing-masing orang nantinya beda-beda pengertian dan nantinya ketika mau di ajukan ada saja yang perlu diperbaiki lagi. Untuk kedepannya kami akan membuat SOP secara tertulis untuk memudahkan masyarakat dalam mengetahui prosedur yang ada di SIKS-NG.” (Wawancara, 03 Desember 2024)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa di Pemerintah Desa Tinggar Buntut belum memiliki SOP terkait SIKS-NG. Namun, kedepannya Pemerintah Desa Tinggar Buntut akan emmbuat SOP terkait SIKS-NG agar masyarakat mengetaui secara jelas mengenai prosedur yang berkaitan dengan SIKS-NG. Selain SOP, Fragmentasi juga diperlukan pada proses implementasi SIKS-NG, Fragmerntasi merrupakan ciri kerdura yang termasuk dalam variabelr strukturr birokrasi. Fragmerntasi jurga mermperngaruhi implemerntasi kebijakan. Fragmerntasi adalah pembagian tanggung jawab surat kerbijakan diantara berrbagai erntitas yang berrberda, yang mermerrlurkan koordinasi [20]. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Nurul Yakin Selaku Operator Aplikasi SIKS-NG di Desa Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal sebagai berikut:

“untuk system memang sudah terintegrasi secara baik dan langsung berkaitan dengan kemensos. Untuk validasi juga tidak ada kaitannya dengan dinsos kabupaten melaikan langsung dari kemensos yang memvalidasi pengajuan kami ini. Kemudian untuk bantuan juga langsung masuk kepada rekening warga masing-masing hanya saja kami menginfokan waktu pencainanya saja kepada warga. Sehingga kami tidak ada kaitannya untuk pengambilan bantuan secara manual ke desa. Untuk data juga sdh terintegrasi langsung dengan data kemiskinan yang dimiliki dinas sosial kabupaten.” (Wawancara, 03 Desember 2024)

Berdasarkan pernyataan diatas tidak terdapat fragmentasi dalam implementasi SIKS-NG sehingga semakin sedikit fragmentasi dalam implementasi SIKS-NG artinya implementasi akan berjalan dengan baik. Dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa dalam indikator struktur birokrasi pada implementasi SIKS-NG di Desa Tinggar Buntut belum memiliki SOP secara tertulis dan tidak terdapat banyak fragmentasi pada implementasi SIKS-NG sehingga konsistensi data sesuai dengan data pusat. Temuan ini juga disandingkan dnegan penelitian terdahulu berjudul “Penerapan Aplikasi SIKS-NG Dalam Penerimaan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Di Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan” dijumpai hasil yang berbeda dimana data kemiskinan di Kelurahan Majasari belum memiliki data yang valid dikarenakan kurangnya koordnasi antara stakeholder yang terkait. Kurangnya koordinasi tersebut membuat perbedaan interpretasi terhadap kebijakan dan prosedur, serta tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas.

IV. SIMPULAN

Berrdasarkan hasil pemerlitan dan pembahasan merngernai Implementasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di Desa Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal sudah dapat dikatakan baik namun manih terdapat kekurangan sebagai berikut :

Pertama, komunikasi dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tinggar BUNTut belum baik dikarenakan Pemerintah Desa Tinggar Buntut hanya melakukan sosialisasi kepada stake holder terkait SIKS- NG hanya dilakukan sekali, sehingga saat ada pembaharuan di SIKS-NG tidak dilakukan sosialisasi Kembali.

Kedua, sumber daya dapat disimpulkan bahwa sumber daya sudah dapat dikatakan belum terpenuhi. Dimana pada sumber daya manusia belum dapat mengoperasikan aplikasi SIKS-NG sesuai dengan kebutuhan dikarenakan kemampuan teknologi informasi yang kurang mempuni. Sedangkan pada sumber daya sarana dan prasarana juga sudah dapat terpenuhi dimana sarana dan prasarana yang menunjang pada pengoperasian aplikasi SIKS-NG tersebut telah disediakan oleh Pemerintah Desa Tinggar Buntut. Serta dalam sumber daya anggaran Pemerintah Desa Tinggar Buntut tidak memiliki alokasi dana khusus untuk implementasi SIKS-NG.

Ketiga, disposisi dapat disimpulkan bahwa Disposisi telah sesuai. Dimana Proses pengangkatan pegawai dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Sedangkan dalam insentif yang diberikan oleh pemerintah Desa Tinggar Buntut yaitu mengikuti Oprator SIKS-NG dalam segala kegiatan diklat yang berkaitan dengan SIKS-NG serta pemerintah Desa Tinggar Buntut kedepannya hendak memberikan beasiswa pengembangan kompetensi Operator SIKS-NG. Serta operator SIKS-NG ini telah mengetahui tugas dan fungsinya sebagai operator SIKS-NG.

Keempat, Struktur Birokrasi implementasi SIKS-NG di Desa Tinggar Buntut belum memiliki SOP secara tertulis dan tidak terdapat banyak fragmentasi pada implementasi SIKS-NG sehingga konsistensi data sesuai dengan data pusat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat tauhid dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian tentang “Implementasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS- NG) di Desa Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal” hingga selesai. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu, penulis ingin berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam menyelesaikan penelitian ini khususnya kedua orang tua saya dan Pemerintah Desa Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto tempat dimana saya melakukan penelitian ini, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

REFERENSI

- [1] Sultan, H. C. Rahayu, And Purwiyanta, “Analisis Pengaruh Kesejahteraan Masyarakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia,” *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, Pp. 75–83, Mar. 2023, Doi: 10.37034/InfEb.V5i1.198.
- [2] D. Cahyadi, Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, A. Basofi, And D. B. Santoso, “Analisis Pengukuran Kesejahteraan Di Indonesia,” 2017.
- [3] K. D. Vega Nilla Sari, U. Dewi, And Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Balai Ekonomi Desa Di Desa Tuksongo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang / Community Empowerment Through Village Economic Program In Tuksongo Village, Borobudur Subdistrict, Magelang Regency,” Thesis, 2021.
- [4] Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial*. 2009.
- [5] B. Beloan, N. Iriani, N. Ilyas, And A. Jamaluddin, “Pemberdayaan Perempuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga.” [Online]. Available: <http://Jurnal.Adptersi.Or.Id/Index.Php/Jtcsa/>
- [6] P. Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*. 2008.
- [7] Samsidar, “Peran Ganda Wanita Dalam Rumah Tangga,” Dec. 2019. [Online]. Available: <https://Jurnal.Iain-Bone.Ac.Id>
- [8] R. M. A. Putra, “Pemenuhan Hak Kesejahteraan Ekonomi Perempuan Melalui Program Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal Dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Materi Hak Asasi Manusia (Studi Di Desa Banjarjo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan),” 2015.
- [9] H. Akib, “Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana,” 2010.
- [10] R. W. Winarti, “Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal Plus (P3EL Plus) (Studi Deskriptif Tentang Faktor-Faktor Determinan Yang Mendukung Keberhasilan Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal Plus (P3EL Plus) Di Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Simokerto Kota Surabaya).”, 2009.
- [11] L. Iryani And S. Sos, “Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Melalui Bidang Usaha Industri Kecil (Studi Di Gampong Matang Meunye Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara),” 2021.
- [12] E. Wahyuni, F. S. Rahmadini, And S. N. Laili, “Evaluasi Dampak Kebijakan Program Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL) Di Kabupaten Sidoarjo,” *Journal Publicuho*, Vol. 4, No. 2, P. 420, May 2021, Doi: 10.35817/Jpu.V4i2.18052.
- [13] M. Jannah And I. Rodiyah, “Implementation Of The Family Hope Program (PKH) In Gemurung Village, Sidoarjo Regency,” *Archive Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*, P. 1, 2023.
- [14] J. Pramono, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Unisri Press, 2020.
- [15] R. M. Putri Putri, S. Sjamsuddin, F. Nurani, And Jurusan Administrasi Publik, Fia, Universitas Brawijaya, “Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Kesetaraan Jender Di Bidang Ekonomi Pada Masyarakat Jombang (Studi Peran Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang).”, 2013.
- [16] A. Syarif, A. A. Unde, And L. Asrul#, “The Importance Of Communication And Information In The Implementation Of Disaster Management Policy In Makassar City,” 2014.
- [17] E. W. Maryam And R. Dewanti, “Partisipasi Masyarakat Terhadap Upaya Pengentasan Kemiskinan

- Berbasis Pemberdayaan Perempuan Melalui Program P3el Kabupaten Sidoarjo,” 2015.
- [18] A. Sarah, “Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Pendidikan Keuangan,” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- [19] H. Akib, “Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana,” 2010.
- [20] P. Afwanda Mayako, Z. Rusli, And Adianto, “Pemberdayaan Perempuan Melalui Implementasi Strategi Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan Di Provinsi Riau,” *Japs: Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, Vol. 1, No. 2, P. 1, Aug. 2020, [Online]. Available: <https://japs.ejournal.unri.ac.id/index.php/japs>

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.